

PENGEMBANGAN STANDAR PELABUHAN PELAKSANA PORT STATE MEASURES AGREEMENT 2009 DI INDONESIA

AKHMAD SOLIHIN



**TEKNOLOGI PERIKANAN LAUT
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2024**

© Hak cipta milik IPB University

IPB University



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “Pengembangan Standar Pelabuhan Pelaksana *Port State Measures Agreement* 2009 di Indonesia“ adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2024

Akhmad Solihin
C461180061

© Hak cipta milik IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

RINGKASAN

AKHMAD SOLIHIN. Pengembangan Standar Pelabuhan Pelaksana *Port State Measures Agreement* 2009 di Indonesia. Dibimbing oleh DARMAWAN, MUHAMMAD FEDI ALFIADI SONDITA, ARI PURBAYANTO.

Illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing tidak hanya mengancam pengelolaan perikanan yang berujung pada kelangkaan ikan, akan tetapi juga perekonomian suatu negara pantai. Salah satu instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat untuk mengatasi permasalahan *IUU Fishing* adalah *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (PSMA 2009)*. Pemerintah Indonesia meratifikasi *PSMA 2009* dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2016. Negara peratifikasi diamanatkan oleh *PSMA 2009* untuk menetapkan pelabuhan pelaksana, namun tidak disertai dengan standar pelabuhan yang ditetapkan tersebut. Ketiadaan standar pelabuhan akan berdampak pada efektivitas pelayanan dalam pencegahan, penghalangan, dan pemberantasan *IUU Fishing*. Oleh sebab itu, diperlukan standar agar tujuan utama *PSMA 2009* berjalan optimal, utamanya di Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman kelas pelabuhan perikanan dan perbedaan fungsi pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) membangun standar layanan pelabuhan pelaksana *PSMA 2009*; (2) mengevaluasi kesiapan pelabuhan pelaksana *PSMA 2009* dalam pencegahan *IUU Fishing*; dan (3) menyusun strategi dan rekomendasi operasionalisasi pelabuhan pelaksana *PSMA 2009*. Metode analisis yang digunakan untuk tujuan 1 adalah *content analysis* dengan metode perbandingan. Metode analisis yang digunakan untuk tujuan 2 adalah *gap analysis*, dan metode analisis yang digunakan untuk tujuan 3 adalah *logical model*.

Hasil analisis mengungkapkan bahwa standar yang harus dipenuhi oleh pelabuhan pelaksana *PSMA 2009*, yaitu (1) pelayanan permohonan, meliputi petugas pelayanan dalam menerima surat permohonan dan petugas analisis risiko; dan (2) pelayanan pemeriksaan, meliputi: petugas terlatih, petugas yang berwenang, petugas yang berbahasa Inggris, mekanisme koordinasi antar instansi, dan identitas petugas.

Dalam evaluasi pelaksanaan *PSMA 2009*, diperoleh informasi bahwa PSM belum dilaksanakan oleh pelabuhan-pelabuhan perikanan meski memiliki regulasi yang terstruktur mulai dari permohonan awal untuk masuk pelabuhan hingga pemeriksaan serta mekanisme pelaporannya. Pelaksanaan *PSMA 2009* terdapat di Pelabuhan Umum Benoa yang dilakukan secara bersamaan antara rezim hukum Port State Control (PSC) dengan rezim hukum Port State Measures (PSM). Artinya terjadi dualisme rezim *port state jurisdiction* antara PSC dan PSM di Pelabuhan Umum Benoa. Sementara terkait dengan kesiapan pelayanan pelabuhan pelaksana *PSMA 2009*, hanya Pelabuhan Umum Benoa yang didukung oleh Tim Inspeksi PSM dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa, dan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Benoa yang siap untuk melaksanakan pelayanan *PSMA 2009*, sedangkan pelabuhan perikanan perikanan di PPS Nizam Zachman, Bitung dan Bungus belum siap melaksanakan *PSMA 2009*.

Rekomendasi yang ditawarkan untuk perbaikan pelayanan *PSMA 2009* yaitu: (1) jangka pendek, meliputi pembentukan forum koordinasi pemeriksa kapal ikan asing, dan (2) harmonisasi PSC dan PSMA dalam pemeriksaan kapal ikan asing, di mana pemeriksaan kapal ikan asing di pelabuhan umum diberlakukan rezim PSC bersama PSMA, namun untuk pelabuhan perikanan hanya diberlakukan rezim PSMA; dan (2) jangka panjang, meliputi: (1) penyamaan metode pendidikan dan pelatihan pemeriksa kapal ikan asing; (2) penyamaan pemberian legalitas petugas pemeriksa kapal ikan asing; (4) penyamaan standar pemeriksaan; dan (5) pelatihan bahasa Jepang untuk pemeriksa kapal ikan asing.

Kata Kunci: *IUU Fishing*, *PSMA 2009*, petugas pemeriksa, pelabuhan perikanan, pelabuhan umum



SUMMARY

AKHMAD SOLIHIN. Developing Implementer Port Standard of PSMA 2009 in Indonesia. Supervised by DARMAWAN, MUHAMMAD FEDI ALFIADI SONDITA, ARI PURBAYANTO.

Illegal, unreported, and unregulated (IUU) Fishing not only threatens fisheries management and causes fish scarcity but can also threaten the economy of coastal countries. One of the international legal instruments that is binding in order to overcome IUU Fishing issues is the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (PSMA 2009). The Indonesian Government has ratified PSMA 2009 through Presidential Regulation (Perpres) No. 43/2016. Ratifying countries are mandated by PSMA 2009 to designate implementing ports, but it does not come together with the standards of the designated ports. The absence of port standards will affect the service effectiveness in relation to the prevention, detention, and elimination of IUU Fishing. Thus, proper standard criteria are needed in order to optimize the main objectives of *PSMA 2009*, especially in Indonesia as an archipelagic state with its fishing port diversity as well as its function differences between public ports and fishing ports.

This study aims to develop the service standard for PSMA 2009 port implementation, evaluate the readiness of PSMA 2009 port implementation in preventing IUU Fishing, and arrange the strategy and recommendation of PSMA 2009 port implementing operationalization. The analysis method used for the first objective was a content analysis by comparison method. The analysis method used for the second objective was gap analysis, while the logical framework model was used to fulfill the third objective.

Analysis results revealed that the standards that must be fulfilled by *PSMA 2009* port implementation were (1) application service, including a service officer in receiving application letter and risk analyst officer, and (2) inspection service, including a trained officer, authorized officer, English speaking officer, coordination mechanism among the stakeholders and officer identity. During the evaluation stage of the implementation of PSMA 2009, PSM had not yet been conducted by fishing ports. However, they already have structured regulations, starting from the initial application to enter the port area to inspection and its reporting mechanism. The implementation of PSMA 2009 can be found at Benoa Port, which was conducted together with the Port State Control (PSC) legal regime and the Port State Measures (PSM) legal regime. It means that there was regime dualism of port state jurisdiction between PSC and PSM in Benoa Public Port. Meanwhile, in relation to the service readiness of PSMA port implementation, only Benoa Public Port was supported by the PSM Inspection Team from Pengembangan Archipelagic Fishing Port, Benoa Marine and Fisheries Resources Surveillance Base, and Benoa Fish Quarantine and Quality Control Agency which are ready to implement PSMA 2009 service. The Fishing Port (PPS) of Nizam Zachman, Bitung, and Bungus is not ready to implement PSMA 2009.

Recommendations offered in order to improve PSMA 2009 service are (1) short term: (1) establishing the coordination forum of foreign fishing vessels inspector, and (2) PSC and PSMA harmonization in inspecting foreign fishing

vessels, in the context where the inspection of foreign *Fishing* vessels at public ports is concerned, the PSC regime operates in conjunction with the PSMA; and (2) long-term: (1) equalization of education and training methods regarding foreign vessels inspection; (2) equalization of legality provision for foreign vessels inspection officer; (3) equalization of inspection standard; and (4) conducting a Japanese training course for foreign *Fishing* vessels inspector.

Key Words: *IUU Fishing, PSMA 2009, inspection officer, Fishing port, public port*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2024
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



**PENGEMBANGAN STANDAR PELABUHAN PELAKSANA *PORT
STATE MEASURES AGREEMENT* 2009 DI INDONESIA**

AKHMAD SOLIHIN

Disertasi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Doktor pada
Program Studi Teknologi Perikanan Laut

**TEKNOLOGI PERIKANAN LAUT
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024**

© Hak cipta milik IPB University

IPB University



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Penguji Luar Komisi Pembimbing pada Ujian Tertutup Disertasi:

- 1 Dr. Retno Muningsgar, S.Pi, ME
- 2 Dr. Datep Purwa Saputra, S.Sos, M.M., M.B.A

Promotor Luar Komisi Pembimbing pada Sidang Promosi Terbuka Disertasi:

- 1 Dr. Retno Muningsgar, S.Pi, ME
- 2 Dr. Datep Purwa Saputra, S.Sos, M.M., M.B.A

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Judul Tesis : Pengembangan Standar Pelabuhan Pelaksana *Port State Measures Agreement* 2009 di Indonesia

Nama : Akhmad Solihin

NIM : C461180061

Disetujui oleh

Pembimbing 1:
Dr. Ir. Darmawan, MAMA



Pembimbing 2:
Dr. Ir. Muhammad Fedi Alfiadi Sondita, M.Sc



Pembimbing 3:
Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M. Sc



Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Dr. Ir. Ronny Irawan Wahyu, M. Phil
NIP 19610906 198703 1 002



Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan :
Prof. Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc
NIP 196307031 198803 1 002



Tanggal Ujian:
(14 Mei 2024)

Tanggal Lulus:
(.....)

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanaahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Desember 2022 sampai bulan Desember 2023 ini ialah pengembangan standar pelabuhan pelaksana *Port State Measures Agreement* 2009 di Indonesia. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Dr. Ir. Darmawan, MAMA, Dr. Ir. Muhammad Fedi Alfiadi Sondita, M.Sc, Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc sebagai komisi pembimbing yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga melalui komunikasi, diskusi dan pengarahan selama masa pembimbingan sampai dengan penyusunan naskah disertasi, pelaksanaan ujian dan finalisasi naskah disertasi;
2. Dr Retno Muningsgar, S.Pi, ME dan Dr. Datep Purwa Saputra, S.Sos, M.M., M.B.A sebagai penguji luar komisi atas koreksi dan masukkannya dalam penulisan disertasi;
3. Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK IPB), Ketua Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK IPB, Ketua dan Sekretaris Program Studi Teknologi Perikanan Laut, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi program Doktor. Seluruh staff pengajar yang telah sabar memberikan ilmu dan motivasi. Staff tenaga kependidikan untuk pelayanan prima selama menempuh pendidikan Doktorat;
4. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL IPB) dan *Wildlife Conservation Society* (WCS) yang telah memberikan beasiswa untuk dapat melanjutkan pendidikan jenjang doctoral dan biaya penelitian;
5. Kepala PPS Nizam Zachman Jakarta, Kepala PPS Bungus Sumatera Barat, Kepala PPS Bitung Sulawesi Utara, Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Benoa Bali, Asisten Deputi Perikanan Tangkap – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Direktorat Pelabuhan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Direktorat Kepelabuhanan – Kementerian Perhubungan yang telah memberikan data dan informasi penelitian;
6. Orang tua kami Abah H Bai Suhana atas doa terbaiknya, kakak-kakak penulis yang telah memberikan doa dan semangat;
7. Isteri tercinta Lilis Supianah, S.Pd atas do'a terbaiknya serta kesabaran dan kasih sayang, anak tercinta Kirana Dyah Prameswari yang selalu memberikan pengertiannya;
8. Teman-teman seperjuangan pascasarjana Program Studi TPL Tahun 2018 Thomas Nugroho, Simon M Picaulima, dan Yudi Herdiana; dan
9. Teman-teman penelitian di PKSPL IPB yang mendukung penyusunan disertasi Sinta Hasriningtyas, Retia Revany, Surga Genta Akmal, Atika Salsabila, dan Hera Ledy Melindo.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bogor, Juli 2024

Akhmad Solihin

© Hak cipta milik IPB University

IPB University



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
GLOSARIUM	xviii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Hipotesis	6
1.6 Kebaharuan (Novelti)	6
1.7 Kerangka Pemikiran	7
II METODE PENELITIAN	8
2.1 Waktu dan Tempat	8
2.2 Alat dan Bahan	8
2.3 Batasan Penelitian	8
2.4 Prosedur Penelitian	8
2.5 Analisis Data	13
III HASIL DAN PEMBAHASAN	16
3.1 Standar pelayanan Pelabuhan Pelaksana <i>PSMA 2009</i>	16
3.2 Evaluasi kesiapan pelabuhan pelaksana <i>PSMA 2009</i>	37
3.3 Strategi dan Rekomendasi Operasionalisasi Pelabuhan Pelaksana <i>PSMA 2009</i>	58
IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	79
RIWAYAT HIDUP	98

DAFTAR TABEL

1	Jenis dan Sumber Data	12
2	Identifikasi standar pelayanan pelabuhan.....	13
3	Analisis perbandingan standar pelabuhan pelaksana <i>PSMA 2009</i> dengan kondisi pelabuhan pelaksana <i>PSMA 2009</i>	14
4	Model logika.....	15
5	Klasifikasi Pelabuhan Perikanan di Indonesia.....	21
6	Klasifikasi Pelabuhan Perikanan dan jumlah sebarannya di Indonesia.....	23
7	Perbedaan ketentuan mengenai penyiapan petugas pemeriksa	29
8	Hasil identifikasi standar pelayanan pelabuhan.....	311
9	Kondisi Eksisting dan Urgensi Pengembangan Standar Pelayanan di Pelabuhan Pelaksana <i>PSMA 2009</i>	315
10	Evaluasi kesiapan pelaksanaan <i>PSMA 2009</i>	57
11	Harmonisasi PSC dan <i>PSMA</i> dalam Pelaksanaan <i>PSMA 2009</i> di Pelabuhan Umum	66

DAFTAR GAMBAR

1	Distribusi Geografik Kejadian <i>IUU Fishing</i>	5
2	Kerangka Pemikiran Penelitian.....	7
3	Pendekatan Penelitian	9
4	Jumlah Pelabuhan Perikanan di Indonesia.....	22
5	Mekanisme Operasi dan Persyaratan PSMA	25
6	Protipe <i>Global Information Exchange System</i>	27
7	Kriteria Pelayanan Pelabuhan Pelaksana <i>PSMA 2009</i>	35
8	Pelaksana <i>PSMA 2009</i> di Pelabuhan Perikanan.....	37
9	Bagan Kelembagaan PSM	39s
10	Proses Penentuan Resiko Terhadap Permohonan Masuk ke Pelabuhan	44
11	Pelaksanaan PSC dan <i>PSMA 2009</i> di Pelabuhan Benoa.....	49
12	Pelaksanaan PSC di Pelabuhan Benoa.....	51
13	Data Kunjungan Kapal Ikan Asing di Pelabuhan Umum Benoa Berdasarkan Negara Kapal.....	54
14	Data Kunjungan Kapal Ikan Asing di Pelabuhan Umum Benoa Berdasarkan Kepentingan	54
15	Penyusunan strategi pelayanan pelabuhan pelaksana PSMA menggunakan <i>PSMA 2009</i> menggunakan model logik	60
16	Harmonisasi PSC dan PSM dalam Pemeriksaan Kapal Ikan Asing di Pelabuhan Umum sebagai Pelabuhan Pelaksana <i>PSMA 2009</i>	655
17	Pemeriksaan Kapal Ikan Asing di Pelabuhan Perikanan sebagai Pelabuhan Pelaksana <i>PSMA 2009</i>	68

GLOSARIUM

ABK	: Anak Buah Kapal
ANT	: Ahli Nautika Tingkat
ATT	: Ahli Teknik Tingkat
AIS	: <i>Automatic Identification System</i>
APCIS	: <i>Asia Pacific Computerize Information System</i>
APMIAS	: <i>Asia Pacific Maritime Information and Advisory Services</i>
BKIPM	: Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
CCSBT	: <i>Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna</i>
CITES	: <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>
CIQ	: <i>Custom, Immigration, and Quarantine</i>
Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
Dirjen	: Direktorat Jenderal
DLKp	: Daerah Lingkungan Kepentingan
DLKr	: Daerah Lingkungan Kerja
DWT	: <i>Dead Weight Tonnage</i>
FAO	: <i>Food Agriculture Organization</i>
GIES	: <i>Global Information Exchange System</i>
GIZ	: <i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i>
GT	: <i>Gross Tonnage</i>
IOTC	: <i>Indian Ocean Tuna Commission</i>
LOA	: <i>Length Over All</i>
IOTC	: <i>Indian Ocean Tuna Commission</i>
IPOA	: <i>International Plan of Action</i>
IMO	: <i>International Maritime organization</i>
IUU	: <i>Illegal, Unreported and Unregulated</i>
Kemenuh	: Kementerian Perhubungan
Kemenko	: Kementerian Koordinasi
Kepmen	: Keputusan Menteri
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP	: Kelautan dan Perikanan
KPLP	: Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai
KSOP	: Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan
LWS	: <i>Low Water Spring</i>
Marinves	: Maritim dan Investasi
MCS	: <i>Monitoring, Controlling and Surveillance</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NIR	: <i>New Inspection Regime</i>
PDK	: Perizinan dan Kenelayanan
Permen	: Peraturan Menteri
Permenhub	: Peraturan Menteri Perhubungan
Perpres	: Perpres

PT	: Perikanan Tangkap
PUSLATLUH	: Pusat Pelatihan dan Penyuluhan
PSDI	: Pengelolaan Sumber Daya Ikan
PPI	: Pangkalan Pendaratan Ikan
PPN	: Pelabuhan Perikanan Nusantara
PPS	: Pelabuhan Perikanan Samudera
PSC	: <i>Port State Control</i>
PSCO	: <i>Port State Control officer</i>
PSDKP	: Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
PSJ	: <i>Port State Jurisdiction</i>
PSM	: <i>Port State Measures</i>
PSMA	: <i>Port State Measures Agreement</i>
RFMO	: <i>Regional Fisheries Management Organization</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SOP	: Standar Operasional Prosedur
STBLKK	: Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal
STTPP	: Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
TOEFL	: <i>Test of English as a Foreign Language</i>
WDPFC	: <i>Western and Central Pacific Fisheries Commission</i>
WKOPP	: Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
VMS	: <i>Vessel Monitoring Systems</i>

©Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.